



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2017
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2017
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

DPRD Apresiasi Rencana Pemkot

Soal Konsultasi ke BPK & KPK

CILEGON, BANPOS - DPRD Kota Cilegon mengapresiasi rencana Pemkot Cilegon yang akan melakukan konsultasi ke BPK dan KPK, terkait rencana proyek pekerjaan Jalan Lingkar Utara (JLU).

Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rachmatullah mengaku sangat mendukung rencana konsultasi tersebut. Sebab, dengan adanya konsultasi itu bisa menghindari adanya

masalah di kemudian hari.

"Saya kira rencana legislatif untuk mengkonsultasikan ke pihak BPK dan KPK patut diapresiasi. Ini juga untuk mencegah adanya permasalahan di kemudian hari," kata Rachmatullah, Selasa (31/10).

Ia mengungkapkan, dengan adanya surat edaran dan yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agraria atau BPN yang dilayangkan langsung untuk Pemkot Cilegon sangat perlu diapresiasi. Sebab, bila surat tersebut tidak langsung dilayangkan ke Pemkot, tentunya di kemudian hari akan menjadi masalah.

"Dengan adanya surat edaran atau pemberitahuan dari Kementerian Agraria atau BPN Kota Cilegon, mereka

jadi kebingungan untuk menggunakan anggaran tersebut," ucapnya.

Rachmatullah berharap, rencana konsultasi yang dilakukan Pemkot Cilegon ke BPK dan KPK, bisa menekan angka Silpa.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Cilegon, Nurrotul Uyyun juga mengapresiasi juga adanya rencana Pemkot Cilegon yang akan berkonsultasi dengan pihak BPK dan KPK. Menurutnya, adanya konsultasi dengan pihak KPK maupun BPK dapat menghasilkan masukan yang optimal, terutama secara regulasi agar bisa aman dan tidak menyalahi aturan.

"Mudah-mudahan dengan terjalinya komunikasi intensif ini akan ada solusi

yang baik di Kota Cilegon," terang Uyyun.

Ia mengaku, jika dengan adanya rencana pembebasan lahan JLU ini tentunya akan menambah aset Pemkot Cilegon untuk kemudian hari, namun dirinya pun tidak menampik jika rencana pembebasan tersebut mundur dari perencanaan yang sudah direncanakan maka juga akan berdampak terhadap tidak menambah aset Pemkot Cilegon.

"Sekiranya pembebasan lahan JLU dilakukan di tahun ini tentu akan berdampak terhadap penambahan aset di Kota Cilegon. Tapi, kalau pembebasan itu mundur di 2018 maka tidak ada penambahan aset di Kota Cilegon," ujarnya.

Politisi dari Fraksi PKS ini menambahkan, jika hingga kini perencanaan dari masing-masing OPD dalam melakukan perencanaan menjadi fokus utama pihak eksekutif untuk mengevaluasi kinerja OPD. Bahkan, pihaknya akan meminta masing-masing OPD untuk memahami perencanaan terhadap proyek pembangunan.

"Tentunya ini akan menjadi catatan untuk kita (DPRD,red) agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh OPD bisa lebih maksimal, terukur sesuai dengan mekanisme yang sudah ada," pungkasnya.(EUA/EKY)